

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA KANTOR DESA DATAI NIRUI KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

Fie Khaeriyah
Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh
Email : fiekhaeriyah@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and describe the Leadership Style of the Village Head in Improving the Performance of village officials at the Datai Nirui Village Office, Teweh Tengah District, North Barito Regency so far. The research results based on the results of interviews and analysis of performance indicators, the leadership style of the Datai Nirui Village Head has tended to be arbitrary. The Village Head works more alone and is rarely present in the office, which has an impact on the low productivity of village officials. The uncoordinated division of tasks and the lack of communication between the Village Head and village officials have caused the quality of services to the community to be disrupted, responsiveness to problems to be slow and accountability of village officials to be poorly managed. In this leadership style, the Village Head tends to make unilateral decisions and reduce the participation of village officials, which affects the low initiative and sense of responsibility among village officials. The Village Head of Datai Nirui should adopt a democratic leadership style, which always involves all decision-making, provides autonomy in carrying out tasks, and creates more open communication. The democratic leadership style will empower village officials to collaborate and take initiative, so that it will ultimately improve performance.

Keywords: Leadership Style, Village Officials' Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja perangkat desa pada Kantor Desa Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan analisis indikator kinerja, gaya kepemimpinan Kepala Desa Datai Nirui selama ini cenderung sewenang-wenang. Kepala Desa lebih banyak bekerja sendiri dan jarang hadir di kantor, yang berdampak pada rendahnya produktivitas perangkat desa. Pembagian tugas yang kurang terkoordinasi serta komunikasi yang kurang antara Kepala Desa dan perangkat desa menyebabkan kualitas layanan kepada masyarakat terganggu, responsivitas terhadap masalah menjadi lambat dan akuntabilitas perangkat desa tidak terkelola dengan baik. Dalam gaya kepemimpinan ini, Kepala Desa cenderung mengambil keputusan sepihak dan mengurangi partisipasi perangkat desa, yang berpengaruh pada rendahnya inisiatif dan rasa tanggung jawab di kalangan perangkat desa. Seharusnya, Kepala Desa Datai Nirui mengadopsi gaya kepemimpinan demokratis yaitu selalu melibatkan segala pengambilan keputusan, memberikan otonomi dalam menjalankan tugas, serta menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, Gaya kepemimpinan demokratis akan memberdayakan perangkat desa untuk berkolaborasi dan berinisiatif, sehingga akhirnya akan meningkatkan kinerja.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kinerja Perangkat Desa

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, organisasi adalah unit sosial yang bekerja secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan memenuhi komitmen sosialnya sangat bergantung pada kepemimpinannya. Jika pemimpin dapat menjalankan tugasnya secara efektif, organisasi tersebut kemungkinan besar akan berhasil. Sebuah organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu memengaruhi perilaku anggotanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin akan dihargai atas kepemimpinannya jika ia mampu menggunakan pengaruhnya dan membimbing bawahannya menuju tujuan organisasi (Robbins, 2006).

Seorang pemimpin sangat penting bagi individu-individu dalam suatu organisasi, terlihat dari bagaimana mereka menjalankan tanggung jawabnya. Suatu organisasi akan berjalan lancar jika dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kepala desa adalah pemimpin tingkat desa yang tidak diragukan lagi dibutuhkan sebagai penggerak untuk senantiasa memberikan semangat, dorongan, dan arahan dalam melaksanakan pekerjaan agar orang lain mengikuti program yang telah mereka tetapkan.

Pemerintahan desa yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya kepala desa yang baik. Menurut Rusyan, H. A. Tabrani, (2018), Pemerintahan desa dipimpin sepenuhnya oleh Kepala Desa. Nama Kepala Desa dapat berubah sesuai adat setempat. Kepala desa merupakan pejabat tertinggi di suatu desa. Kepala desa memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan layanan publik dan memastikan keberhasilan program. Memperkuat dan memberdayakan tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan proyek pembangunan desa, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik adalah contoh bagaimana aparatur negara berfungsi. Mengembangkan pelayanan publik merupakan pilihan strategis bagi tata kelola pemerintahan Indonesia yang baik. Hal ini

dikarenakan salah satu tolok ukur penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan. Pelayanan publik didefinisikan sebagai penyediaan layanan (melayani) kebutuhan masyarakat atau komunitas yang berkepentingan terhadap suatu organisasi sesuai dengan aturan dan prosedur pokok yang telah ditetapkan (Aprindawati, 2017).

Seorang pemimpin berperan penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Kepemimpinan menunjukkan cara kerja suatu organisasi. Kepemimpinan memastikan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan dapat melakukan bagiannya untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pemimpin bertindak berbeda saat memimpin timnya. Gaya kepemimpinan mengacu pada berbagai cara seseorang memimpin. Kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan adalah pola keseluruhan perilaku seorang pemimpin yang mencerminkan situasi yang konsisten; oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang paling ideal adalah yang memaksimalkan kepuasan kerja sekaligus mudah beradaptasi dengan perubahan keadaan (Rivai, 2012).

Dalam hal ini, gaya kepemimpinan Kepala Desa sangat penting bagi kinerja perangkat Desa di Desa Datai Nirui. Karena salah satu kriteria yang memengaruhi kinerja adalah gaya kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, gaya kepemimpinan Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa sangat penting dalam menentukan keberhasilan perangkat desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kepemimpinan Kepala Desa dalam memberikan teladan dan perilaku yang baik sebagai seorang pemimpin akan mendorong perangkat desa untuk bekerja dengan baik, mengembangkan setiap bawahannya untuk berperilaku positif dan termotivasi dalam bekerja, sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan terbagi menjadi dua kategori: pemimpin dan pegawai. Desa Datai Nirui,

Kecamatan Teweh Tengah, merupakan organisasi pemerintahan dengan sekitar kurang lebih 7 pegawai. Untuk mencapai perilaku dan sikap positif pegawai, seorang pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat.

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam meningkatkan efektivitas aparatur desa. Kepemimpinan Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan desa tidak hanya harus memastikan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin, tetapi juga harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, khususnya aparatur desa. Kepemimpinan Kepala Desa dapat mengoordinasikan semua kepentingan masyarakat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Datai Nirui dari awal Juli 2023 hingga akhir Agustus 2023, peneliti menemukan bahwa Kepala Desa Datai Nirui tampak terbuka menerima dan mendengarkan saran atau masukan dari bawahannya, berupaya mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan, dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerintahannya, khususnya kurangnya Sumber Daya Aparatur Desa.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, belum mampu merespon kebutuhan masyarakat secara optimal dikarenakan beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang berbanding terbalik dengan banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, sehingga mengakibatkan beberapa tugas tidak terlaksana sesuai dengan aturan, serta masih rendahnya kesadaran perangkat desa dalam menaati setiap aturan, seperti melanggarnya. Disinilah kepala desa dituntut untuk mengatur kegiatan desa agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan menyejahterakan masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti, Kepala

Desa telah bekerja dengan baik bersama bawahannya dan masyarakat; namun, masyarakat dan perangkat desa masih mengeluh bahwa Kepala Desa jarang masuk kantor selama jam kerja. Kepala Desa lebih banyak bekerja sendiri, dengan dalih mengejar target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Oleh sebab itu hubungan Kepala Desa dengan para perangkat desa bahkan masyarakat menjadi kurang harmonis dan memunculkan kesan Kepala Desa belum mampu memotivasi dan membangun kerjasama para perangkat desa untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari hilangnya semangat terutama pada saat jam kerja dan saat masuk dan pulang kerja di luar jam yang telah dijadwalkan. Hal ini berimbas pada kinerja perangkat desa yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintahan di desa, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak tercapai. Oleh sebab itu, Kepala Desa Datai Nirui perlu memiliki gaya kepemimpinan dengan cara yang baik untuk menciptakan keharmonisan dengan para perangkat desa sehingga mampu mengendalikan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparat desa.

Selain itu Kepala Desa tidak mengetahui persis tingkat kebutuhan perangkat desa sehingga dalam upaya memberikan motivasi kepada perangkat desa melalui persepsinya sendiri tanpa ia mengetahui yang sebenarnya dibutuhkan perangkat desa baik itu kebutuhan fisiologis maupun psikologis. Maka penulis berasumsi bahwasanya jika Kepala Desa belum menerapkan gaya kepemimpinan berdasarkan level kematangan dan kebutuhan perangkat desa. Tentunya permasalahan ini mengakibatkan menurunnya kinerja aparat desa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Data Evaluasi Kinerja Aparat Desa

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Catatan Penurunan
Pelayanan Publik	65%	78%	70%	Waktu respon terhadap pengajuan administrasi semakin lama, dan ada keluhan warga.
Penyelesaian Administrasi	90%	82%	74%	Penurunan produktivitas penyelesaian dokumen seperti surat tanah dan KK.
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	80%	75%	65%	Penurunan laporan rutin kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa.
Kedisiplinan Aparat Desa	88%	80%	72%	Tingkat kehadiran dan ketepatan waktu aparat desa berkurang.
Kemampuan Koordinasi	80%	77%	68%	Lemahnya komunikasi internal menyebabkan beberapa proyek tidak selesai tepat waktu.
Kepuasan Masyarakat	82%	74%	66%	Tingginya keluhan masyarakat terkait pelayanan dan kurangnya respons positif.

Sumber : Kantor Desa Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

Evaluasi kinerja Kantor Desa Datai Nirui menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 di seluruh indikator, seperti pelayanan publik, penyelesaian administrasi, transparansi pengelolaan dana desa, kedisiplinan aparat, koordinasi internal, dan kepuasan masyarakat. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi, penurunan motivasi dan disiplin aparat desa, serta rendahnya koordinasi antar pihak terkait yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian tugas. Untuk memperbaiki kinerja, disarankan adanya peningkatan pelatihan bagi aparat desa, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan koordinasi, dan disiplin dalam menjalankan tugas.

Untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari situasi yang dihadapi, diperlukan penelitian tambahan sesuai dengan kajian ilmiah. Berdasarkan pendahuluan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menemukan dan meneliti “ **Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara**”.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen dalam bahasa Indonesia mengacu pada pengelolaan. Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, yang berarti pengelolaan, tata pimpinan, dan ketatalaksanaan. Artinya, manajemen adalah proses di mana individu atau organisasi mengoordinasikan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Secara istilah, manajemen adalah pengorganisasian dan pengawasan atas masalah-masalah suatu bisnis atau sektor tertentu. Definisi yang luas ini secara bertahap berkembang hingga mencakup pengelolaan bidang-bidang lain dari lembaga sosial masyarakat termasuk lembaga keagamaan.

Proses manajemen terbagi menjadi empat fungsi khusus manajer: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan keempat fungsi ini, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengelolaan berbagai upaya anggota organisasi, dan pemanfaatan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.

Manullang (2018:32) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, persiapan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengertian manajemen menurut Gibson (2017:65) adalah suatu prosedur di mana satu individu atau lebih bekerja sama untuk mengoordinasikan beberapa kegiatan lain guna mencapai tujuan yang mustahil dicapai oleh satu orang saja. Manajemen, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya manusia dan non-manusia dalam suatu organisasi.

Agar sebuah organisasi berhasil, kepemimpinan yang kuat sangatlah penting. Mempengaruhi dan memengaruhi orang lain agar menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan hasil yang diharapkan merupakan proses kepemimpinan. Menurut Sulthon Syahrir, (2019) Kepemimpinan dapat dimaknai sebagai proses kompleks di mana seorang pemimpin menginspirasi bawahannya untuk melaksanakan dan mencapai visi, tujuan, dan tugas-tugas yang akan memajukan dan mempersatukan organisasi. Seorang pemimpin mencapai proses ini dengan memanfaatkan karakteristik kepemimpinannya, yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, etika, kualitas karakter, pengetahuan, dan kemampuan.

Istilah pemimpin memiliki beberapa arti. Pemimpin adalah hasil interaksi antara faktor individu atau pribadi dan keadaan situasional. Karjadi, (2003) menjelaskan seorang pemimpin didefinisikan sebagai seseorang yang dapat menggerakkan orang lain sehingga orang-orang dalam suatu organisasi yang telah dirancang dan diorganisasikan sebelumnya dengan kondisi moralitas yang tinggi, dengan kegairahan dan penuh semangat dapat memenuhi tanggung jawab masing-masing dengan hasil yang

diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk mengkaji objek-objek alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen utama, sumber data diperoleh *purposive* dan *snowball*, teknik penelitian yang digunakan adalah triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena para peneliti meyakini topik yang dibahas rumit dan dinamis, sehingga wawancara langsung dengan narasumber digunakan. Lebih lanjut, peneliti bermaksud memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peristiwa sosial dengan mengidentifikasi pola, gagasan, dan teori yang konsisten dengan bukti yang dikumpulkan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak pernah melampaui tahap analisis fenomenologi. Peneliti pada pandangan fenomenologis untuk memahami kaitannya dan peristiwa terhadap orang-orang dalam situasi tertentu (Moleong, 2006).

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2011) Populasi adalah wilayah general dari berbagai hal atau individu yang mempunyai atribut dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Perangkat Desa, RT, BPD, PLD, dan Kader Desa Datai. Populasi yang diambil dengan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut pasti pernah melakukan kunjungan ke Kantor Desa Datai Nirui.
- b. *Key Person* yang mengetahui tentang informasi kepemimpinan dan kinerja perangkat desa Datai Nirui.

Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017), Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, sehingga jumlah sampel yang dikumpulkan harus cukup untuk mewakili populasi yang diteliti. Sampel dikumpulkan karena peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan dana saat melakukan penelitian pada populasi yang luas. Peneliti kemudian harus mengumpulkan sampel yang secara akurat mencerminkan populasi. Prosedur penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang bersifat *incidental*. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan siapa pun yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015). Maka sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 7 orang perangkat desa Kantor Desa Datai Nirui yaitu Perangkat Desa, RT, BPD, PLD dan Kader Desa Datai Nirui.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis Kinerja Perangkat Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Datai Nirui yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat mengklarifikasi pertanyaan, informan merespons ketika ditanya, dan informan dapat menceritakan kisah tentang masa lalu dan masa depan.

Wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini. Wawancara tidak terstruktur, juga dikenal sebagai wawancara bebas, adalah wawancara yang tidak terorganisir secara

sistematis, dimana pertanyaan disesuaikan dengan situasi, pertanyaan biasanya tidak dipersiapkan sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik unik informan, serta penerapan alur tanya jawab seperti dalam percakapan sehari-hari.

2. Observasi

Observasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap aktivitas sumber penelitian di lapangan. Menurut Moleong, 2019, Observasi adalah kegiatan yang membantu peneliti meningkatkan kapasitas mereka dalam hal motivasi, keyakinan, atensi, perilaku bawah sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, observasi non-partisipatif digunakan, dimana peneliti bertindak semata-mata sebagai pengamat independen. Peneliti tidak berpartisipasi dalam aktivitas sumber data.

3. Dokumentasi

Salah satu pendekatan pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat diuji, ditafsirkan, dan bahkan diprediksi. Adapun studi dokumentasi dapat dianggap sebagai strategi pengumpulan data yang menggunakan sumber daya tekstual yang disediakan oleh lembaga penelitian, seperti prosedur, peraturan, foto, laporan kerja, foto, atau dokumen elektronik (rekaman).

4. Studi Pustaka

Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan atau variabel yang dieksplorasi melalui literatur relevan, seperti data penjualan perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator kinerja dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa, RT, BPD, PLD, dan Kader

Desa Cerdas ditemukan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Datai Nirui cenderung menunjukkan ciri-ciri gaya kepemimpinan sewenang-wenang. Beberapa indikator kerja yang dilihat setelah diwawancari adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas

Permasalahan: produktivitas perangkat desa dinilai rendah. Kepala Desa lebih banyak mengerjakan tugas-tugas penting sendiri dan jarang hadir di kantor pada jam kerja. Pembagian tugas tidak berjalan optimal dan sering kali perangkat desa merasa tidak diberdayakan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan mereka.

Gaya Kepemimpinan: Kepala Desa cenderung menggunakan pendekatan sewenang-wenang yang menempatkan dirinya sebagai pusat kontrol dan pengambil keputusan utama. Keputusan dibuat tanpa melibatkan perangkat desa, yang mengakibatkan rendahnya inisiatif dan semangat kerja di kalangan perangkat desa.

2. Kualitas Layanan

Permasalahan: kualitas layanan kepada masyarakat tidak memadai. Hal ini terjadi karena perangkat desa tidak mendapatkan arahan yang jelas dari Kepala Desa dalam menyelesaikan tugasnya. Kurangnya bimbingan dan koordinasi antara Kepala Desa dan perangkat desa menyebabkan pelayanan publik yang kurang optimal.

Gaya Kepemimpinan: Kepala Desa yang sewenang-wenang tidak cukup memperhatikan umpan balik atau masukan dari perangkat desa. Gaya kepemimpinan ini mengurangi kolaborasi antara Kepala Desa dan perangkat desa, yang berujung pada layanan yang tidak maksimal.

3. Responsivitas

Permasalahan: responsivitas terhadap isu atau masalah yang muncul seringkali lambat. Kepala Desa lebih cenderung menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah yang dihadapi perangkat

desa atau masyarakat. Komunikasi yang kurang terbuka antara Kepala Desa dan perangkat desa menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan yang cepat. Gaya Kepemimpinan: dengan gaya sewenang-wenang, Kepala Desa menjadi pusat pengambilan keputusan, yang menyebabkan kurangnya fleksibilitas dan kelambatan dalam merespon masalah.

4. Responsibilitas

Permasalahan: tanggung jawab perangkat desa seringkali tidak jelas dan terkoordinasi dengan baik. Banyak perangkat desa yang merasa tidak diberdayakan untuk mengambil inisiatif atau membuat keputusan dalam pekerjaannya. Kepala Desa cenderung lebih banyak mengerjakan tugas sendiri daripada memberikan tanggung jawab kepada perangkat desa.

Gaya Kepemimpinan: gaya sewenang-wenang membatasi kesempatan perangkat desa untuk bertanggung jawab secara mandiri. Kepala Desa lebih sering mengontrol dan mengerjakan tugasnya sendiri, yang mengurangi rasa tanggung jawab perangkat desa.

5. Akuntabilitas

Permasalahan: akuntabilitas dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban juga terganggu. Kepala Desa tidak sering melakukan pemeriksaan terhadap laporan atau melakukan evaluasi yang melibatkan perangkat desa. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan administrasi desa.

Gaya Kepemimpinan: dalam gaya kepemimpinan sewenang-wenang, pengawasan dan evaluasi dilakukan sepihak tanpa adanya diskusi terbuka mengenai pencapaian dan kekurangan yang ada, sehingga akuntabilitas menjadi rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori kepemimpinan: berdasarkan wawancara dengan perangkat desa dan teori kepemimpinan yang relevan, gaya kepemimpinan yang seharusnya diterapkan oleh Kepala Desa Datai Nirui adalah

kepemimpinan demokratis. Kepala Desa perlu mengadopsi gaya kepemimpinan ini untuk meningkatkan kinerja perangkat desa. Berikut adalah analisis terhadap masing-masing indikator kinerja yang perlu diperbaiki, serta dasar teori yang relevan untuk perbaikan tersebut:

1. Produktivitas

Untuk meningkatkan produktivitas perangkat desa, Kepala Desa harus mendelegasikan tugas secara lebih efektif. Setiap perangkat desa perlu diberikan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidangnya agar mereka dapat bekerja secara mandiri tanpa menunggu instruksi terus-menerus. Dengan sistem kerja yang lebih terstruktur dan pembagian tugas yang merata, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien, sehingga produktivitas perangkat desa meningkat.

Selain pembagian tugas yang jelas, Kepala Desa juga perlu lebih aktif dalam memberikan motivasi kepada perangkat desa. Motivasi ini bisa berupa penghargaan terhadap kinerja yang baik, kesempatan pengembangan diri, atau apresiasi dalam bentuk lain yang dapat meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya penghargaan dan dorongan positif, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk bekerja lebih giat.

Disiplin dalam kehadiran dan keterlibatan Kepala Desa di kantor desa juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Kepala Desa harus hadir secara rutin dan memastikan komunikasi dengan perangkat desa berjalan dengan baik. Dengan kepemimpinan yang lebih terbuka dan kehadiran yang aktif, perangkat desa akan merasa lebih diperhatikan, sehingga produktivitas kerja dapat meningkat.

Teori Terkait: Lewin, Lippitt, dan White (1939), dalam penelitian mereka mengenai gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota tim. Dalam

penelitian mereka, kelompok yang dipimpin dengan gaya demokratis lebih aktif dalam berkolaborasi dan mencapai tujuan bersama, yang akhirnya mendorong peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

2. Kualitas Layanan

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Kepala Desa harus memastikan bahwa setiap aparatur desa memahami tanggung jawab dan protokol pelayanannya. Kepala Desa dapat menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap jenis layanan, yang memberikan panduan sistematis kepada aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan SOP yang efektif, layanan masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat, tepat, dan profesional.

Selain itu, Kepala Desa perlu mendorong adanya pelatihan atau bimbingan secara berkala bagi perangkat desa. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan administrasi, komunikasi, serta pendekatan dalam melayani masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas perangkat desa, mereka akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa juga harus lebih terbuka terhadap masukan dan keluhan masyarakat tentang layanan yang ditawarkan. Masyarakat dapat menyampaikan gagasan mereka tentang layanan yang mereka terima melalui forum diskusi atau kotak saran. Dengan adanya evaluasi berkala berdasarkan masukan dari masyarakat, kualitas pelayanan desa dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan warganya. Teori terkait Bass, (1985) dalam teori kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya inspirasi dan pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Pemimpin yang menganut pendekatan demokratis lebih mampu memberdayakan bawahan

untuk mencapai tujuan bersama, yang dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bass dan Avolio, (1990) juga menunjukkan bahwa pemimpin transformasional dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kualitas layanan dengan meningkatkan keterlibatan dan komitmen tim.

3. Responsivitas

Agar lebih responsif dalam menghadapi berbagai permasalahan di desa, Kepala Desa harus menciptakan sistem komunikasi yang lebih terbuka dengan perangkat desa dan masyarakat. Kepala Desa perlu memastikan bahwa setiap laporan atau keluhan dari masyarakat dapat segera ditindak lanjuti dengan koordinasi yang cepat dan efektif. Dengan sistem komunikasi yang baik, setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Selain itu, Kepala Desa hendaknya lebih melibatkan perangkat desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Dengan mendengarkan gagasan dan masukan dari pemerintah desa akan menghasilkan solusi yang lebih relevan dan spesifik di lapangan. Keterlibatan perangkat desa juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul.

Penting juga bagi Kepala Desa untuk membangun mekanisme kerja yang lebih fleksibel dalam merespon situasi mendesak. Dengan adanya kebijakan yang memungkinkan perangkat desa untuk bertindak cepat dalam kondisi tertentu, pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih tanggap dan efektif. Responsivitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan meningkatkan hubungan antara perangkat desa dan warga. Teori terkait Yukl, (2010) dalam bukunya *Leadership in Organizations* menjelaskan bahwa

Pemimpin yang memanfaatkan pendekatan demokratis lebih responsif terhadap tantangan karena mereka melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan Kepala Desa untuk lebih cepat menangani isu atau masalah yang muncul, karena adanya keterlibatan semua pihak dalam proses tersebut.

4. Responsibilitas

Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab perangkat desa, Kepala Desa perlu memberikan kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang. Setiap perangkat desa harus memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas serta pemahaman mengenai peran mereka dalam pemerintahan desa. Kepala Desa juga harus mendorong inisiatif dari perangkat desa dengan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugas mereka. Dengan demikian, perangkat desa akan merasa lebih memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Selain memberikan kejelasan tugas, Kepala Desa juga perlu membangun budaya kerja yang berbasis pada kepercayaan dan dukungan. Kepala desa mesti memberi kesempatan kepada perangkat desa untuk menyampaikan pikiran dan usulan tanpa takut dianggap terlalu benar. Dengan adanya komunikasi dua arah yang efektif, perangkat desa akan lebih percaya diri dalam mengambil tanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen.

Evaluasi kinerja yang rutin juga penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa memahami sejauh mana tanggung jawab mereka telah dilaksanakan. Kepala Desa dapat menyelenggarakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan pekerjaan dan strategi pemecahan masalah. Dengan strategi ini, tanggung jawab perangkat desa dapat lebih diperkuat, sehingga menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Teori terkait Hackman &

Oldham, (1980) tentang motivasi kerja, mendefinisikan otonomi dan tanggung jawab dengan jelas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kinerja anggota tim. Kepala Desa yang menerapkan gaya demokratis akan memberikan perangkat desa kebebasan dalam menjalankan tugas mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap hasil pekerjaan.

5. Akuntabilitas

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, Kepala Desa harus menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan terstruktur. Setiap perangkat desa harus diberikan kewajiban untuk menyusun laporan kerja secara berkala, yang kemudian dievaluasi bersama oleh Kepala Desa dan pihak terkait. Dengan adanya sistem pelaporan yang jelas, kinerja perangkat desa dapat lebih terpantau, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam tugas.

Selain itu, Kepala Desa perlu membangun budaya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan administrasi desa. Setiap kebijakan yang diambil harus disosialisasikan kepada perangkat desa dan masyarakat agar dapat dipahami serta diawasi bersama. Melibatkan perangkat desa dalam evaluasi kebijakan juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap hasil kerja yang dilakukan, sekaligus meminimalisir kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.

Penerapan mekanisme audit dan pengawasan independen juga dapat membantu memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa harus membuka diri terhadap kritik dan masukan dari perangkat desa serta masyarakat guna memperbaiki sistem kerja yang ada. Kepercayaan publik terhadap perangkat desa dapat ditingkatkan secara signifikan dengan membangun struktur pemerintahan yang

transparan dan akuntabel.

Teori terkait Robinson & Judge, (2017) dalam *Organizational Behavior* menjelaskan bahwa pemimpin dengan gaya demokratis mampu mendorong akuntabilitas dengan menciptakan budaya evaluasi yang terbuka dan transparan. Dengan mengadopsi sistem pelaporan yang jelas dan rutin, serta mengadakan diskusi terbuka mengenai hasil kerja, Kepala Desa dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan desa. Selain itu, dengan adanya evaluasi yang melibatkan semua pihak, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis indikator kinerja, gaya kepemimpinan Kepala Desa Daiti Nirui selama ini cenderung sewenang-wenang. Kepala Desa lebih banyak bekerja sendiri dan jarang hadir di kantor, yang berdampak pada rendahnya produktivitas perangkat desa. Alokasi pekerjaan yang kurang terencana dan kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan perangkat desa mengakibatkan terganggunya mutu pelayanan kepada masyarakat, lambatnya tanggung jawab terhadap permasalahan, dan tidak terkendalinya akuntabilitas perangkat desa. Dalam gaya kepemimpinan sewenang-wenang, Kepala Desa cenderung mengambil keputusan sepihak dan mengurangi partisipasi perangkat desa, yang berpengaruh pada rendahnya inisiatif dan rasa tanggung jawab di kalangan perangkat desa.

Kepala Desa Daiti Nirui seharusnya menunjukkan kepemimpinan yang demokratis. Kepala Desa dapat meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dengan melibatkan perangkat desa dalam pengambilan keputusan, memberi mereka kebebasan untuk menjalankan tanggung jawab, dan mendorong

komunikasi yang lebih terbuka. Gaya kepemimpinan yang demokratis mendorong perangkat desa untuk berkolaborasi dan berinisiatif, sehingga meningkatkan kinerja mereka. Menurut penelitian terkait, gaya kepemimpinan ini mendorong tingkat keterlibatan, motivasi, dan kinerja yang lebih tinggi, yang bermanfaat bagi pengelolaan dan penyediaan layanan desa.

Saran

1. Kepala Desa perlu memberikan pengawasan yang lebih terstruktur dengan menetapkan tujuan yang jelas serta menyediakan panduan yang memadai. Penetapan jadwal evaluasi kinerja secara teratur dan transparan akan membantu perangkat desa dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka.
2. Partisipasi perangkat desa dalam pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Kepala Desa dapat membuat forum rutin atau pertemuan untuk mendiskusikan kebijakan dan program desa, sehingga perangkat desa merasa lebih terlibat dan memiliki kontribusi terhadap kebijakan yang diambil.
3. Pimpinan Desa perlu membuka lebih banyak ruang komunikasi, baik formal maupun informal, untuk mendengar keluhan, saran, atau masalah yang dihadapi oleh perangkat desa. Komunikasi yang terbuka dan dua arah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan respon terhadap masalah yang ada.
4. Kepala Desa harus lebih terlibat langsung dalam implementasi program desa dan mendukung perangkat desa dengan memberikan arahan yang jelas. Ini akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memperkuat hubungan antara pimpinan desa dengan perangkatnya.
5. Evaluasi kinerja perangkat desa perlu dilakukan dengan lebih terstruktur dan objektif. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa harus diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas Kepala Desa. Kepala Desa harus memberikan informasi yang jelas

mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya desa agar perangkat desa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka.

Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan. *Journal of Social and Policy Issues*.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, Wayan Ardi. 2021. *GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG. <http://digilib.unila.ac.id/60477/>

Illah, Mutha. 2023. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Desa Tetewatu Kabupaten Soppeng*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Rajawali.

Lagantondo, Herlan. 2018. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Desa Pada Kantor Tindoli Kabupaten Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie

Lagantondo, Herlan. 2019. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan pemerintah No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putri, Doris Febriyanti dan Amaliatulwalidain. 2022. *Gaya Kepemimpinan Kepala*

Sadapu, Hasman Umuri dan Gretty Syatriani Saleh. 2023. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato*. Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/310>

Saparin, (2003). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Sevilla, Consuelo G., Ochave, Jesus A., Punsalan, Twila G., Regala, Bella P., dan Uriarte Gabriel G., 1984. *Pengantar Metode Penelitian*. Terjemahan oleh Alimuddin Tuwu. 1993. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Subakti, Via Maharani. 2022. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus Di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo)*. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Suganda, Dann. 2001. *Kepemimpinan di dalam Organisasi dan Manajemen*. Bandung. CV Sinar Baru.

Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Riris, Fauzia 2016. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Aparatur Desa*. Diterbitkan. Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan. Universitas Gadjah Mada.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi, (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rusyan, H. A. Tabrani, (2018). Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Veithzal Rivai, (2004), *Meningkatkan Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo

Profil Penulis

dr. Fie Khaeriyah, S.E., M.M, Dosen Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Muara Teweh Jl. Berlian No 55, Kec. Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah 73811

Email : fiekhaeriyah@gmail.com